

KOMUNIKASI BENCANA

Kata Pengantar :

Dr. Eko Harry Susanto

(Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi – ASPIKOM)

Editor :

Setio Budi HH



KOMUNIKASI BENCANA

Kata Pengantar:

Dr. Eko Harry Susanto

**(Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi-
ASPIKOM)**

Editor:

Aswad Ishak, Fajar Junaedi,

Setio Budi HH, dan Agung Prabowo



KOMUNIKASI BENCANA

© Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)

Penulis:

Eko Harry Susanto, Setio Budi HH, Lucinda, Agustinus Gatot Bintoro,
Puji Lestari, Ade Chandra, Ahmad Arif, M Badri, Santi Indra Astuti, Heri Budianto,
Fajar Junaedi

Editor:

Aswad Ishak, Fajar Junaedi, Setio Budi HH, Agung Prabowo

Perancang sampul: Mapa

Penata Letak: Mapa

Pertama kali diterbitkan oleh

Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)

Bekerja sama dengan

Buku Litera, Yogyakarta dan PERHUMAS, BPC Yogyakarta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit**

Cetakan Pertama, Maret 2011

xiv+228 hlm.; 15.5x23.5cm

ISBN: 978-602-99074-3-8

Dicetak Oleh:

Mata Padi Pressindo

08179407446, 081227837806

tribima@yahoo.com, matapadi_media@yahoo.com

Daftar Isi

Prakata Editor	vii
Kata Pengantar	
<i>Dr. Eko Harry Susanto</i>	<i>ix</i>
Bagian I	
Faktor Komunikasi dalam Peristiwa dan Manajemen Bencana	
Eksistensi Komunikasi dalam Menghadapi Bencana	
<i>Eko Harry Susanto</i>	<i>3</i>
Komunikasi Bencana : Aspek Makro dan Mikro	
<i>Setio Budi HH</i>	<i>21</i>
Pemimpin Indonesia dalam Penanganan Bencana, Sebuah Refleksi tentang Kesigapan Pemimpin Indonesia Menghadapi Bencana	
<i>Lucinda</i>	<i>39</i>
Logistik Bencana : Konsep, Tantangan dan Kesempatan	
<i>Agustinus Gatot Bintoro</i>	<i>61</i>
Manajemen Komunikasi Bencana dan Peluang Riset Komunikasi Bencana di Indonesia	
<i>Puji Lestari</i>	<i>81</i>
Problematika Komunikasi dan Posisi Ilmu Komunikasi dalam Dinamika Perkembangan Manajemen Bencana di Indonesia	
<i>Ade Chandra</i>	<i>117</i>

Bagian II

Bencana, Media dan Pemberitaan

Jurnalisme Bencana: Tugas Suci, Praktik Cemar <i>Ahmad Arif</i>	141
Paradigma Jurnalisme Sensitif Bencana <i>M Badri</i>	155
Kabar Bencana di Layar Kaca: Beberapa Catatan terhadap Pemberitaan Letusan Merapi 2010 di Televisi Indonesia <i>Santi Indra Astuti</i>	175
" <i>Provokasi Media</i> " di Daerah Rawan Bencana <i>Heri Budianto</i>	193
Manajemen Penyiaran Berita Bencana <i>Fajar Junaedi</i>	207
Tentang Penulis dan Editor	225

Manajemen Komunikasi Bencana dan Peluang Riset Komunikasi Bencana di Indonesia

Puji Lestari

Latar Belakang

Bencana merupakan gangguan atau kekacauan fungsi sosial yang serius yang menyebabkan meluasnya kerugian jiwa, materi dan atau lingkungan yang melebihi kemampuan orang yang mengalami musibah untuk mengatasi dengan sumber daya yang tersedia. Bencana terjadi tatkala sumberdaya atau kapasitas yang tersedia sangat tidak memadai dalam mengatasi ancaman yang menyebabkan kerugian dan kehilangan nyawa, materi dan lingkungan.

Lebih separuh dari seratus bencana terburuk sepanjang masa di dunia disebabkan oleh alam (Spignesi, 2006: 7). Bencana alam adalah kejadian-kejadian luar biasa yang di luar kendali manusia yang bersifat merusak dan merugikan makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Bencana alam bisa merusak harta benda manusia atau bahkan bisa melukai dan merengut nyawa manusia yang terkena bencana alam. Untuk itulah kita harus waspada dan selalu siap sedia atas kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada diri kita. Beberapa bencana alam yang ada di sekitar kita (disertai pengertian atau definisi) :

1. Banjir

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir.

2. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, leleran lahar, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang luas akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak daerah di sekitarnya. Hutan yang terbakar juga bisa sampai ke pemukiman warga sehingga bisa membakar habis bangunan-bangunan yang ada.

3. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah gerakan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat luluh lantak apa-apa yang ada di permukaan bumi. Rumah, gedung, menara, jalan, jembatan, taman, landmark, dan lain sebagainya bisa hancur rata dengan tanah jika terkena gempa bumi yang besar.

Gambar.1 Foto Benteng di Kotagede DIY akibat gempa Mei 2006



4. Tsunami

Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar/cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Tsunami sangat berbahaya karena bisa menyapu bersih pemukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Tsunami yang besar bisa membunuh banyak manusia dan makhluk hidup yang terkena dampak tsunami.

5. Gunung Meletus

Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batubatuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Sebagai contoh gunung Merapi di DIY-Jateng.

Gambar 2. Gunung Merapi saat mengeluarkan awan panas



Tabel 1. Karakteristik Gunung Merapi

Nama	Gunung Merapi
Jenis	Stratovolkano
Nama Kawah	Kawah Mati
Lokasi	Koordinat/ Geografi : 7°32,5'LS dan 110°26,5' BT. Secara administratif termasuk :Kab. Sleman, Prop. DI. Yogyakarta, Kab. Magelang, Boyolali, Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Ketinggian	2968 m. dpl (kondisi tahun 2001) atau 3079 m di atas kota Yogyakarta.
Kota Terdekat	Sleman, DI. Yogyakarta, dan Magelang Jawa Tengah

6. Angin Puting Beliung / Angin Ribut

Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia.

7. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Masalahnya jika ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh maka sangat berbahaya. Tidak hanya tanah saja yang longsor karena batu, pohon, pasir, dan lain sebagainya bisa ikut longsor menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya.

Posisi geografis dan geologis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap ancaman berbagai jenis bencana alam. Hal ini terlihat pada ciri-ciri sebagai berikut (Asmadi, 2011) :

- a. Memiliki 129 gunung berapi aktif dan 70 gunung diantaranya potensial dikategorikan sangat berbahaya.
- b. Memiliki 5.590 sungai utama yang potensial banjir.
- c. Memiliki 17.508 pulau \pm 440 suku bangsa dan \pm 13.000 dialek.
- d. Berada diantara dua benua dan dua lautan besar, potensial terjadi angin.
- e. Memiliki pantai : $81.487 \text{ km} = 2 \times$ panjang keliling bumi.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam dan bencana sosial. Tahun demi tahun negeri kita tak lepas dari bencana. Kasus tsunami Aceh tahun 26 Desember 2004 yang menewaskan nyawa manusia hingga 228.432 jiwa, tsunami Nias 2005, gempa di DIY dan Jateng 27 Mei 2006 yang menghilangkan nyawa sekitar 6000 orang dan lebih 100.000 rumah hancur. Tanggal 275

Februari 2007 Kapal motor penumpang Levina tiba-tiba tenggelam. Tanggal 30 Oktober 2009 lebih dari 1000 orang tewas dalam gempa di Padang Sumatera Barat (Arif, 2010), Merapi meletus September 2010, banjir bandang di Aceh pada Maret 2011.

Hal ini memperlihatkan banyak masalah terkait dengan korban manusia, harta benda, kerusakan lingkungan, pranata sosial dan konflik sosial yang bisa mengarah ke disintegrasi bangsa. Begitu cepat bencana itu datang, namun secepat pula orang melupakannya. Cara berpikir warga masyarakat dan manajemen pemerintah tidak banyak berubah. Proses mitigasi masih tersengal-sengal tak mampu mengikuti ritme bencana yang menyebar dengan pesat. Berbeda dengan warga Jepang yang sangat sadar akan ancaman gempa dan tsunami, bahkan ketika tengah malam harus dievakuasi, mereka sudah siap melakukannya dengan cepat (Arif, 2010:22). Kerusakan jalan akibat gempa dan tsunami di Jepang Maret 2011 sudah diperbaiki dalam 6 hari setelah peristiwa itu terjadi (Kompas, Maret 2011). Semua itu tidak terlepas dari manajemen komunikasi bencana, maka kajian-kajian tentang manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan.

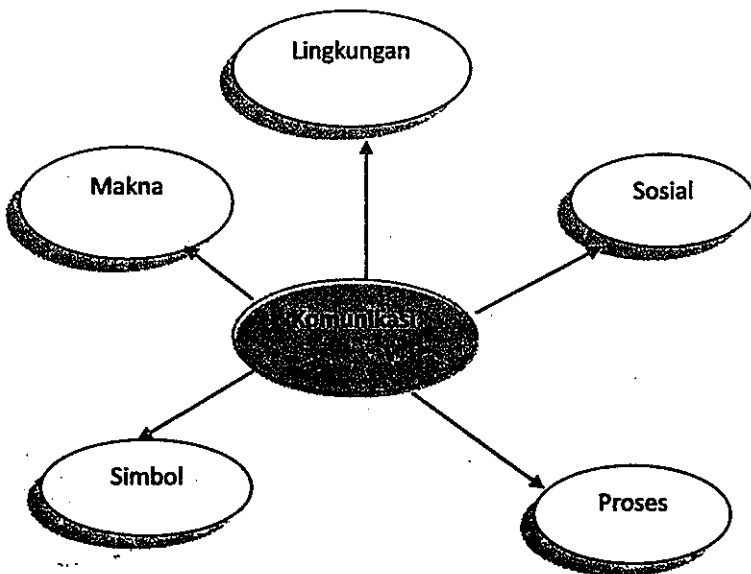
Konsep Manajemen Komunikasi Bencana

Konsep tentang manajemen komunikasi bencana masih perlu dikaji secara luas dan mendalam. Banyak definisi tentang manajemen, komunikasi, dan bencana, namun pengertiannya masih terpisah-pisah. Sebelum mendiskusikan tentang manajemen komunikasi bencana, sebaiknya kita perlu mendeskripsikan tentang : manajemen, komunikasi, dan bencana, Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Terry, 2005). Menurut Handoko (2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-

sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Paling kurang ada tiga alasan utama mengapa manajemen itu dibutuhkan. *Pertama* : untuk mencapai tujuan; *kedua* : untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi; *Ketiga* : untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Inti dari manajemen adalah suatu program yang terencana, terorganisir, dan terimplementasi secara efektif dan efisien, serta dievaluasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.

Gambar 3. Definisi Komunikasi (West and Turner, 2007: 5)



Gambar 3. Mendeskripsikan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yaitu suatu kejadian yang berkesinambungan, dinamis, dan tidak memiliki akhir. Sosial artinya manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Simbol berarti suatu label yang diberikan kepada sebuah fenomena. Simbol konkret yaitu simbol yang mempresentasikan sebuah objek, dan simbol abstrak mempresentasikan sebuah ide, gagasan, atau pemikiran. Makna merupakan sesuatu yang diambil orang atas suatu pesan. Pesan dapat

memiliki lebih dari satu makna, dan makna memiliki konsekuensi budaya. Sedangkan lingkungan adalah situasi atau konteks di mana komunikasi terjadi, terkait dengan waktu, tempat, periode sejarah, relasi dan latarbelakang budaya antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

Komunikasi adalah suatu proses interaksi timbal balik antara satu individu atau sekelompok individu dengan individu lain yang bertujuan untuk menciptakan kesamaan makna., artinya apa yang disampaikan oleh komunikator dapat dimengerti dan dimaknai sama oleh komunikan, dan sebaliknya posisi komunikator dan komunikan saling bergantian. Pada saat berbicara disebut komunikator, sementara pada saat mendengarkan disebut komunikan.

Bencana menurut Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Dengan kata lain, bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi, akibat faktor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi, teror bom, konflik Poso, dan lain-lain.

Manajemen komunikasi bencana yang dimaksud dalam diskusi ini adalah pengaturan penanggulangan masalah bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat. Komunikasi atau koordinasi penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk memperoleh tujuan yaitu agar penanganan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Koordinasi memerlukan : (Lestari, 2006:199)

1. Manajemen penanggulangan masalah bencana yang baik.
2. Adanya tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi
3. Sumber daya dan waktu yang akan membuat koordinasi berjalan.
4. Jalannya koordinasi berdasarkan adanya pertukaran informasi dari berbagai sumber informasi yang berbeda.

Guna memperoleh efektifitas dan optimalisasi sumberdaya diperlukan persyaratan tertentu antara lain :

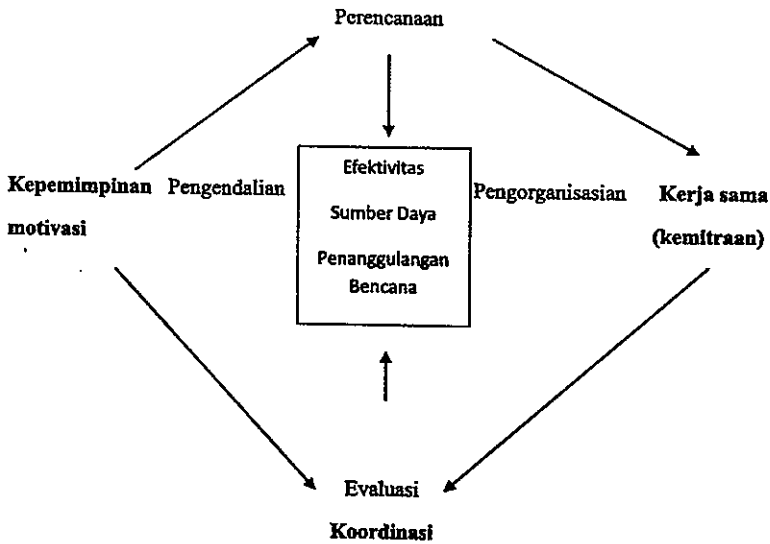
1. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan
2. Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis
3. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak
4. Koordinasi yang harmonis

Keempat syarat tersebut dipadukan untuk menyusun :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengendalian
4. Evaluasi Penanggulangan Bencana

Pernyataan di atas dapat disederhanakan dalam model sebagai berikut :

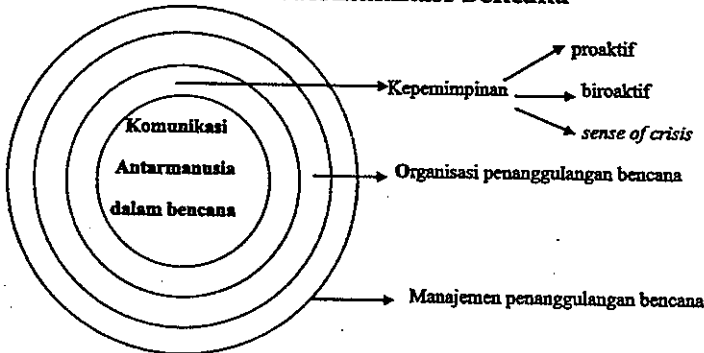
Gambar 4. Kerangka Konsep Manajemen Komunikasi Bencana
Komunikasi berbagai arah



(Sumber : Lestari, 2006 :199).

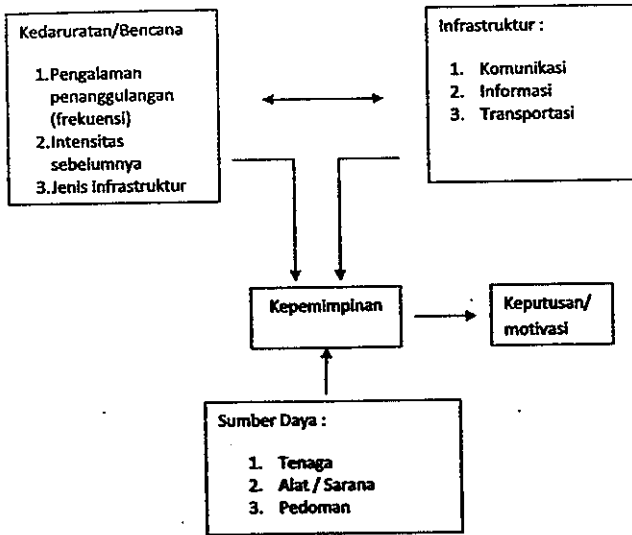
Inti dari manajemen komunikasi bencana adalah penanggulangan masalah -masalah bencana yaitu adanya organisasi penanggulangan yang efektif dan efisien dilandasi dengan adanya kepemimpinan yang proaktif, mempunyai *sense of crisis* dan tidak melupakan birokrasi yang ada serta didasari adanya hubungan antara manusia yang baik.

Gambar 5 : Komunikasi Bencana



Di samping komunikasi antar pihak yang terlibat, dalam penanganan bencana diperlukan Kepemimpinan Situasi Krisis sebagai berikut :

Gambar 6 : Kepemimpinan situasi krisis



(Sumber : Lestari, 2006: 200).

Dari gambar di atas komponen kepemimpinan sangat berpengaruh dan mendasari pengambilan keputusan dan motivasi. Hal-hal lain yang mempengaruhi kepemimpinan adalah :

1. Sumber daya yang ada : antara lain ketersediaan tenaga, sarana dan alat serta finansial.
2. Kedaruratan Bencana, pengalaman penanggulangan bencana sebelumnya, intensitas bencana, dan jenis bencana.
3. Infrastruktur : ketersediaan sarana komunikasi, distribusi informasi, dan sarana transportasi.

Fungsi Komunikasi Sosial sebagai Manajemen

Menurut Susanto (1988) Komunikasi sosial berfungsi sebagai dasar tindakan atau kegiatan komunikasi yang menjadi alat untuk mengatur atau mengendalikan anggota komunitas dan anggota ini mengetahui apa yang diharapkan oleh pihak lain terhadap dirinya dalam hidup bermasyarakat. Wilbur Schram mendeskripsikan empat fungsi komunikasi sosial, yaitu :

1. Komunikasi sebagai radar sosial. Komunikasi sosial berfungsi untuk memastikan atau memberi keyakinan kepada pihak lain mengenai

informasi yang sedang berlangsung, bahwa apabila ada informasi yang baru dan relevan dengan kehidupan masyarakat, masyarakat yang memperoleh informasi tersebut dapat menggunakannya dalam pergaulan sehari-hari, agar tidak ketinggalan informasi .

2. Komunikasi sebagai **manajemen**. Komunikasi sosial berfungsi sebagai dasar tindakan atau kegiatan komunikasi yang menjadi alat untuk mengatur atau mengendalikan anggota komunitas dan anggota ini mengetahui apa yang diharapkan oleh pihak lain terhadap dirinya dalam hidup bermasyarakat.
3. Komunikasi sebagai sarana **sosialisasi**. Kegiatan komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan atau pendidikan bagi warga atau pun generasi baru dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini disebut juga sebagai proses sosialisasi.
4. Kegiatan komunikasi yang berfungsi untuk **menghibur** masyarakat, atau kegiatan yang dapat melepaskan ketegangan hidup bermasyarakat. Mis. pentas seni / wayangan.

Berkaitan dengan manajemen komunikasi bencana, bahwa komunikasi berfungsi sebagai radar sosial, yaitu memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Komunikasi ini memancarkan kepada seluruh masyarakat mengenai bencana apa yang terjadi, kapan bencana itu terjadi, di mana, bagaimana bisa terjadi, siapa yang terkena dampak bencana, bagaimana kondisi mereka, mengapa bisa terjadi, dan masyarakat harus bagaimana ?

Komunikasi sebagai manajemen, artinya komunikasi yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat menjadi dasar pelaksanaan tindakan tertentu. Sebagai contoh, dengan adanya informasi tentang bencana Merapi pada bulan Oktober 2010, masyarakat lereng merapi dan sekitarnya menjadi waspada, dan melakukan berbagai persiapan untuk menyelamatkan diri. Bahkan adanya informasi bahwa merapi berbahaya sampai radius 20 kilometer, menyebabkan semakin banyak warga masyarakat yang mengungsi ke tempat yang lebih aman.⁵⁰

Komunikasi sebagai sarana sosialisasi, artinya komunikasi yang dilancarkan akan menyadarkan orang lain tentang berita tertentu. Ketika ada bencana merapi, maka komunikasi berfungsi sebagai sarana sosialisasi untuk membantu para korban bencana Merapi. Sosialisasi

dapat dilakukan melalui komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, publik, media massa, dan komunikasi interaktif.

Mengingat pentingnya komunikasi ini, maka jalur telepon hotline 24 jam antara gubernur dan presiden diharapkan akan menjadi jembatan komunikasi yang tepat untuk menghindari keterlambatan penanganan bencana. *Short cut* akses langsung ke presiden akan memotong jalur birokrasi yang terkadang memakan banyak waktu. Harus diakui, ini merupakan langkah maju dalam manajemen komunikasi penanganan bencana alam yang selalu dilaksanakan dalam situasi tanggap-darurat. Dengan akses langsung tersebut, presiden dapat segera mengambil keputusan untuk mengkoordinasikan tindakan terkait dengan penanganan bencana alam yang akan, sedang maupun telah terjadi di daerah. Namun jalinan komunikasi bencana alam yang baik tentu bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah saja. Pemda juga perlu mengaktifkan saluran komunikasi bencana intra maupun antar RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga ke provinsi. Melalui jalinan komunikasi ini, peringatan dini bencana alam dapat segera disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisasi. Laporan terjadinya bencana, wilayah yang tertimpa dan jumlah korban, juga bisa dilakukan dalam waktu singkat ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi untuk segera mendapatkan penanganan dan penanggulangan sebagaimana mestinya. (<http://bacatanda.wordpress.com/2008/01/16/pentingnya-komunikasi-bencana-alam/>).

Sebagai sarana hiburan, komunikasi sosial dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang terjadi. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan bercerita, permainan, kesenian, dan lain-lain yang dilakukan oleh para relawan di lokasi pengungsian. Tujuannya agar mereka dapat menghibur para pengungsi yang sudah jenuh dengan keadaannya.

Peran Komunikasi dalam Manajemen Komunikasi Bencana

Hampir setiap tempat tinggal manusia di dunia memiliki resiko bencana, yang sering tidak disadari oleh masyarakat dan tidak dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan sering terjadi bencana secara mendadak atau tidak terduga. Dampak paling awal dari terjadinya bencana adalah kondisi darurat, bahwa korban tidak mampu memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan kapasitasnya sendiri. Kondisi ini harus bisa direspons secara cepat, dengan tujuan utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban sehingga kondisi kualitas hidup tidak makin parah. Setelah situasi darurat itu direspons, bencana harus ditangani secara menyeluruh baik substansi dan akar masalahnya. Dengan demikian kondisi darurat perlu dipahami sebagai salah satu fase dari keseluruhan resiko bencana itu sendiri. Penanganan kondisi darurat pun perlu diletakkan dalam sebuah perspektif penanganan terhadap keseluruhan siklus bencana.

Setelah kondisi darurat, biasanya diikuti dengan kebutuhan pemulihan (rehabilitasi), rekonstruksi (terutama menyangkut perbaikan-perbaikan infrastruktur yang penting bagi keberlangsungan hidup komunitas), sampai pada proses kesiapan terhadap bencana, dalam hal ini proses preventif. Setiap proses penanganan bencana selalu melibatkan peran komunikasi, baik komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, publik, media massa, media interaktif, dan bahkan komunikasi lintas budaya. Peran-peran komunikasi dapat dideskripsikan pada setiap tahap penanganan bencana, walaupun langkah-langkah penangan setiap bencana yang terjadi di setiap propinsi penanganannya tidak sama, tergantung kondisi di mana bencana terjadi, budaya, karakter, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut, dan lain-lain yang ada di wilayah bencana (Notosrijoedono, 2010). Berikut tahap-tahap penanganan bencana menurut UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 dan kompetensi komunikasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam tahapan penanganan bencana. Tahapan dimulai dari prabencana, saat bencana berupa tanggap darurat, dan pascabencana dengan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Pada saat **Prabencana**, menurut Pasal 34, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi: (a). dalam situasi tidak terjadi bencana; dan (b). dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;

- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala. Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat **tanggap darurat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pada tahap penilaian kondisi darurat dilakukan suatu proses

mengumpulkan informasi atau data yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya petugas akan menganalisis situasi untuk menentukan dan menilai kondisi-kondisi korban apakah rusak ringan, sedang, atau berat serta jumlah yang meninggal, sakit parah, ringan, dan sebagainya. Pada tahap ini dilakukan proses komunikasi antara petugas dengan masyarakat korban di lokasi bencana, komunikasi dengan aparat pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan monitoring dan refleksi yang berlangsung terus-menerus guna membantu perencanaan program yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat korban.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi. (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Kemampuan manajemen komunikasi penanggulangan masalah akibat bencana di lapangan memerlukan proses sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

- a. Perencanaan adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan-penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Perencanaan juga merupakan kegiatan-kegiatan rohaniah sebelum melakukan tindakan jasmaniah.
- c. Perencanaan itu amat diperlukan dalam rangka mengarahkan tujuan dan sasaran organisasi maupun tujuan suatu program pembangunan, sebab daripadanya dipaparkan pula tentang kebutuhan penggunaan tenaga kerja, biaya, waktu, peralatan, dan sumber-sumber (*resources*) lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah :
 - 1) Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
 - 2) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
 - 3) Di manakah tindakan itu harus dikerjakan ?
 - 4) Kapankah tindakan itu harus dikerjakan ?
 - 5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
 - 6) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

- a. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya beserta penetapannya dengan cara-cara yang tepat mengenai orang-orangnya (*staffing*) yang harus menduduki fungsi-fungsi itu berikut penentuannya dengan tepat tentang hubungan wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Pengorganisasian itu dilakukan demi pelaksanaan kerja dan

pelaksanaan dari perencanaan, yang penting demi adanya pembagian kerja yang setepat-tepatnya.

- c. Dalam pengorganisasian sangat penting untuk diperhatikan bahwa penepatan mengenai orang-orangnya haruslah dilakukan secara objektif dan setelah terlebih dahulu ditentukan unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya.

Hal-hal yang diperlukan dalam pengorganisasian antara lain :

- 1) Mengambil keputusan.
- 2) Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara atasan dan bawahan.
- 3) Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak.
- 4) Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Pendorongan (*motivating*)

- a. Pendorongan merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat kerja dan kerelaan kerja para pegawai (anggota organisasi) demi tercapainya tujuan organisasi.
- b. Pendorongan itu penting sekali mengingat arti pentingnya faktor manusia dalam organisasi dan dalam proses produksi.
- c. Rangkaian kegiatan pendorongan ini mencakup segi-segi dorongan atau perangsang yang bersifat kerohanian (seperti pemberian kenaikan pangkat, pemberian pendidikan dan pengembangan karier, penambahan pengalaman, penyelenggaraan human relations dengan tepat, pemberian cuti, dan sebagainya), maupun segi-segi dorongan kejasmanian (seperti adanya sistem upah dan gaji yang mengairahkan, pemberian tunjangan -tunjangan serta distribusi sandang dan pangan, penyediaan perumahan, kendaraan, jaminan-jaminan pemeliharaan kesehatan, dan lain-lainnya).

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses ini yaitu memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing yang ditetapkan semula. *Motivating* atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan.

4. Pengendalian atau kontrol (*controlling*)

- a. Pengendalian atau kontrol adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian (*evaluation*) untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagai mana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengendalian atau kontrol itu perlu untuk mengetahui sampai dimana pekerjaan sudah dilaksanakan, sumber-sumber yang telah dimanfaatkan, hambatan-hambatan, dan sebagainya.
- b. Dari hasil pengorganisasian, itu dapatlah diadakan penyempurnaan, evaluasi, dan penentuan tentang perlunya tindakan-tindakan korektif ataupun tindak lanjut yang harus dilakukan, sehingga pemborosan-pemborosan dapat dihindarkan dan pengembangan-pengembangan selanjutnya dapat di tingkatkan pelaksanaannya.

Evaluasi atau kontrol artinya mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula. Salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

Peran komunikasi sesuai dengan pendapat Silvia Fanggalda,dkk. (2002) bahwa pada tahap perencanaan antara lain informasi-informasi yang terangkum dalam laporan hasil *asement* kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan tidak selalu berupa pemberian bantuan kemanusiaan. Beberapa kegiatan yang bisa menjadi *follow-up* dari hasil penilaian antara lain:

1. Memulai kegiatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana.
2. Melakukan monitoring situasi secara reguler.
3. Mendukung pihak lain yang memberikan bantuan kemanusiaan.
4. Melakukan advokasi atau tekanan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, baik bantuan maupun perubahan kebijakan (khususnya kepada pemerintah).

Pelaksanaan Operasi di lapangan dilakukan dengan registrasi. Registrasi adalah sebuah cara sistematis mengumpulkan informasi dari kelompok target, dalam hal ini, registrasi ditujukan untuk mengetahui jumlah keseluruhan kelompok target yang akan dibantu secara tepat dan langsung dari sumbernya. Dalam kondisi tertentu, registrasi dapat dilakukan pada saat perencanaan awal agar jumlah kelompok target dalam proposal program bisa dicantumkan dengan detail. Selanjutnya diperlukan sosialisasi yang dilaksanakan seefektif mungkin dan sejelas-jelasnya dengan melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, pemerintah dan para orang-orang muda, dan tokoh-tokoh agama. Ini penting untuk menghindari adanya kendala pada saat melakukan registrasi nanti akibat perbedaan persepsi dan kesalahpahaman kelompok target terhadap program ini. Pada proses ini perlu diperhatikan proses komunikasi dengan masyarakat target termasuk apabila ada penundaan distribusi dari yang direncanakan untuk mencegah adanya pikiran negatif terhadap organisasi.

Tahap **Koordinasi** pada suatu kondisi darurat yang membutuhkan bantuan dari luar akan ada banyak lembaga yang terlibat, baik pemerintah, lembaga lokal, lembaga keagamaan maupun lembaga-lembaga dana. Koordinasi penting untuk menghindari kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan (*overlooked*) bantuan dan kekeliruan penafsiran kondisi. Kegiatan koordinasi umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan koordinasi antara sesama NGO dan atau lembaga pemerintah yang bekerja pada suatu kondisi bencana yang sedang terjadi.

Tahap **monitoring dan evaluasi** diadakan penyempurnaan, evaluasi, dan penentuan tentang perlunya tindakan-tindakan korektif ataupun tindak lanjut yang harus dilakukan, sehingga pemborosan-pemborosan dapat dihindarkan dan pengembangan-pengembangan selanjutnya dapat di tingkatkan pelaksanaannya.

Pada semua tahap tersebut proses komunikasi akan lancar apabila para pihak yang terlibat memiliki kompetensi komunikasi yang baik, seperti kompetensi komunikasi interpersonal sebagai berikut : keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesamaan (Widjaja, 2000: 128-130) :

1. Keterbukaan

Sifat keterbukaan menunjuk paling tidak pada dua aspek tentang komunikasi interpersonal yaitu: (1) Terbuka pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Hal ini berarti bahwa kita harus dengan serta merta mempunyai kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah umum yang dihadapi oleh para korban bencana. (2) Menunjuk pada kemampuan kita untuk memberikan tanggapan terhadap para korban dengan jujur dan terus terang tentang segala sesuatu yang dikatakannya.

2. Empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk menampakkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain. Dalam arti bahwa seseorang petugas harus mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami oleh para korban bencana. Dengan empati, seseorang berusaha melihat dan merasakan seperti yang dilihat dan dirasakan orang lain.

3. Sikap mendukung (*Supportiveness*)

Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila dalam diri seseorang ada perilaku mendukung. Artinya seorang petugas dalam menghadapi suatu masalah (bencana) tidak bersikap *defensif* (bertahan) sesuai pendiriannya, namun harus mendukung perasaan dan kemauan para korban.

4. Sikap positif (*Positiveness*)

Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila kita memiliki sikap positif. Sikap positif pada komunikasi interpersonal paling tidak menunjuk pada dua aspek, yaitu: (1) Komunikasi interpersonal akan berkembang bila ada pandangan positif terhadap diri sendiri. Para petugas harus mampu mengelola perasaannya secara positif, jangan berorientasi memperoleh keuntungan di saat membantu para korban bencana. (2) Mempunyai perasaan positif terhadap orang lain dalam berbagai situasi komunikasi. Jangan ada prasangka buruk terhadap

setiap orang yang dihadapi, karena prasangka akan mempengaruhi situasi komunikasi selanjutnya, yaitu apabila sudah didahului prasangka, maka komunikasi tidak akan efektif.

5. Kesamaan (*equality*)

Kesamaan dalam komunikasi interpersonal mencakup dua hal yaitu:

- a. Kesamaan dalam kerangka berpikir (*frame of reference*) antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Hal ini akan memperlancar proses komunikasi, misalnya apa yang diharapkan masyarakat korban ternyata sama dengan program yang direncanakan oleh pemerintah.
- b. Kesamaan bidang pengalaman (*field of experience*), di antara perilaku komunikasi. Komunikasi akan lancar apabila pihak-pihak yang berkomunikasi mempunyai pengalaman yang sama, misalnya sama-sama pernah menjadi korban bencana alam.

Di samping kompetensi komunikasi interpersonal, para pihak yang terlibat dalam proses manajemen bencana juga harus memiliki kompetensi komunikasi kelompok (mampu bekerja sama dengan anggota-anggota kelompok). Manajemen bencana akan optimal apabila komunitas lokal bersikap kooperatif dan mau terlibat pada setiap proses komunikasi bencana, termasuk member usulan atau gagasan kepada pemerintah.

Komunikasi lintas budaya (mau dan mampu berempati dengan orang-orang dari budaya yang berbeda) juga perlu dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pasca bencana, termasuk masyarakat korban bencana. Hal ini penting karena dalam proses tanggap darurat sampai rehabilitasi, melibatkan orang-orang dari berbagai budaya yang datang memberi bantuan, bahkan banyak pendonor berasal dari negara lain. Manajemen komunikasi bencana hendaknya mempertimbangkan dan responsive terhadap keberagaman, perbedaan, dan persaingan ekonomi, politik, atau agama. Perbedaan ini sering menimbulkan masalah yang kompleks, seperti konflik antar korban, antara pendonor dengan korban, dan lain-lain, sehingga kompetensi komunikasi lintas budaya sangat membantu.

Kompetensi Komunikasi massa juga sangat diperlukan dalam manajemen bencana, baik prabencana, saat bencana, maupun

pascabencana. Pada prabencana, media dapat mengangkat berbagai informasi yang ada kaitannya dengan mitigasi bencana, saat bencana media massa sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memantau perkembangan bencana yang terjadi, dan pascabencana media massa dapat memberikan informasi terkait penanganan tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Perlu diingat bahwa periode pascabencana jauh lebih panjang dari peristiwa bencana yang terjadi. Faktor tersebut dapat membuat media massa berperan dalam membangun dialog agar proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung dengan cepat dan mampu membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat (Gubernur DIY, 2010). Hal yang sering terjadi di negeri kita, media massa sangat gencar memberi informasi tentang bencana pada saat terjadi peristiwa bencana saja, karena dianggap sebagai berita yang aktual. Pengelola media massa belum banyak menyadari pentingnya komunikasi pascabencana, baik saat rekonstruksi maupun rehabilitasi yang sarat dengan berbagai konflik di masyarakat dan harus segera dipecahkan. Peran media massa menjadi cermin sejauhmana kepedulian pengelola media terhadap problematika masyarakat di wilayah bencana.

Penyampaian informasi tentang bencana dan manajemen bencana yang cepat juga dapat dilakukan melalui komunikasi yang menggunakan media baru. Yang termasuk media baru adalah semua sumber daya yang ada dalam internet, misalnya *world wide web*, *facebook*, *e-mail*, *blog*, *twitter*, dan lain-lain (Abrar, 2011:166). Menurut Melissa dan Anis Hamidati (2011:152) bahwa teknologi media baru khususnya internet dan media sosial telah mengubah interaksi antar manusia secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengguna media sosial yang kian meningkat. Komunikasi melalui media baru ini lebih fleksibel (waktu bukan menjadi halangan) dan biaya relatif terjangkau. Jadi media ini merupakan salah satu media yang sangat efektif dalam proses penanganan bencana yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini.

Hasil Riset Manajemen Komunikasi Bencana

Hasil penelitian Lestari (2006) di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, tentang manajemen komunikasi bencana di daerah tersebut kurang bagus. Saat tanggap darurat banyak warga kelaparan, kebingungan,

tak ada informasi yang jelas mereka harus bagaimana, ke mana, karena tidak ada perencanaan. Saat rekonstruksi dan rehabilitasi, pengorganisasiannya tidak baik (banyak unsur KKN) sehingga saat pelaksanaan kurang optimal & banyak masalah a.l. informasi tidak merata-salah satu kepala Desa ditahan karena bentrok dengan warga masalah korupsi dana gempa, evaluasi tidak dilakukan dengan baik.

Hasil penelitian Lestari, Susilastuti, & Retno Hendariningrum (2008) dana hibah bersaing DP2M Dikti tentang manajemen konflik komunikasi di daerah bencana gempa (Jateng dan DIY). Hasilnya konflik komunikasi terjadi pada masyarakat level bawah (para korban) sampai level pemerintah pusat. Sumber konflik ada bermacam-macam, mulai dari pembagian bantuan saat tanggap darurat sampai rekonstruksi dan rehabilitasi. Jenis konflik ada intrapersonal (stress), antarpersonal (antar suami-istri, antar saudara soal warisan), dan antar kelompok (antar relawan, antar pendonor, pemerintah vs LSM, pemerintah vs pemerintah masalah kebijakan dan kasus korupsi dana bantuan gempa). Apabila dibandingkan, manajemen konflik yang relatif lebih baik adalah Kab.Bantul baru Sleman.

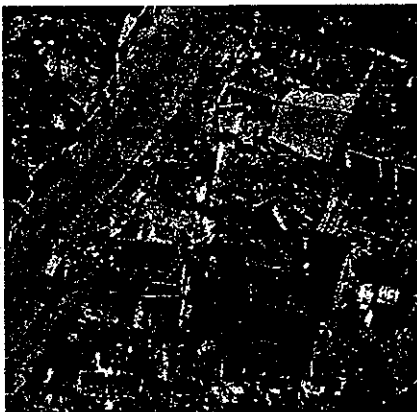
Di Kabupaten Bantul ada perencanaan melalui berbagai peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh aparat di bawahnya, pengorganisasian lebih tertata, pelaksanaannya banyak aduan masyarakat dilayani melalui buku aduan, maupun media massa & diselesaikan, Aliran informasi di bantul lebih lancar karena berbagai media sangat mendukung seperti koran daerah KR, Bernas, Radar Jogja, dll. Jogja TV, RB TV, TVRI Jogja, banyak Radio di Jogja yang mendukung kelancaran komunikasi bencana, majalah dan buletin tentang bencana gempa). Tahap evaluasi dilakukan Pemda Bantul guna perbaikan program kerja selanjutnya. Penyelesaian konflik di Kab.Bantul relatif lebih tertata dan didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bantul DIY (Lestari,Susilastuti & Retno, 2009).

Di Sleman juga sudah membuat perencanaan penanganan bencana melalui berbagai perda, pengorganisasian agak bermasalah karena ada unsur KKN- beberapa aparat desa, dusun, terkena kasus korupsi dana bantuan gempa. Pada tahap pelaksanaan hamper sama dengan Bantul banyak media massa yang memperlancar proses komunikasi bencana. Bedanya di Sleman tidak ada program buku aduan langsung

dan buletin bencana. Terdapat evaluasi atas pelaksanaan program oleh Pemda Sleman. Di Kabupaten Klaten, manajemen komunikasi bencana kurang tertata dengan baik. Dokumen perencanaan di Kesbanglinmas yang dipasrahi mengkoordinir penanganan bencana gempa tidak sebanyak di Bantul dan Sleman. Pengorganisasian yang dilakukan kurang tertata, dan pelaksanaannya kurang baik. Banyak warga, LSM, dan pendonor demo ke Pemda Klaten terkait penanganan dana gempa yang tidak transparan. Peran media massa tidak sebanyak di Bantul maupun Sleman. Jaringan komunikasi juga tidak sebanyak di Bantul dan Sleman, sehingga banyak korban harta benda dan jiwa yang penanganannya agak lambat dibandingkan DIY.

Berikut beberapa gambar yang memperlihatkan kerusakan akibat gempa tersebut:

Gambar 7. Foto kerusakan akibat gempa 27 Mei 2006 di DIY-Jateng.

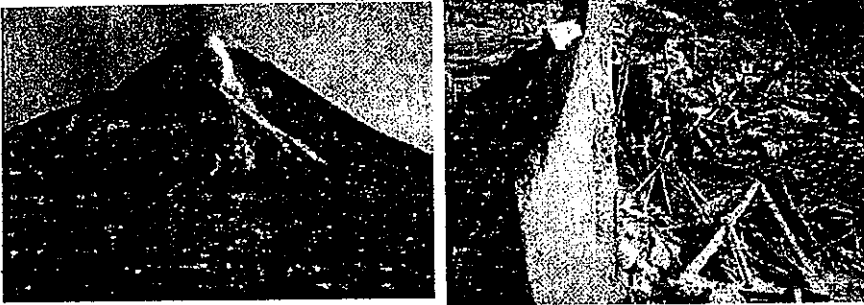


Hasil penelitian Lestari,dkk (2010) di Sleman tentang manajemen komunikasi bencana Merapi, bahwa Pemda Sleman sudah melakukan berbagai perencanaan terkait mitigasi bencana merapi. Diantaranya Tahun 2008 sistem mitigasi Merapi berbasis internet (*smartbox*) di SD Tarakanita Tritis Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem sudah diresmikan Dubes Selandia Baru dan Bupati. Di samping itu diresmikan juga system pemantauan dini *Early Warning System (EWS)* bahaya Merapi di Kali Boyong dusun Kemiri Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem. Di daerah tersebut juga sudah diadakan gladi penanggulangan bencana merapi yang melibatkan PMI dan sukarelawan terlatih.

Pada Saat terjadi bencana Merapi meletus 26 Oktober 2010, Pemda sudah menangani dengan berbagai persiapan dan kekuatan yang ada secara optimal. Manajemen dan koordinasi sesuai prosedur dalam perencanaan. Informasi mengenai bencana merapi cepat tersebar di masyarakat walaupun saat itu terjadi pada tengah malam hingga dini hari. Lokasi pengungsian dan bahan makanan seadanya sudah dipersiapkan oleh pemda dan masyarakat. Di Maguwo masyarakat saling menghubungi melalui alat komunikasi yang ada, termasuk *short message service (SMS)*, *telephone*, *HT*, dan lain-lain agar warga membantu menyediakan makanan dan minuman saat pengungsi datang. Koordinasi berjalan cepat antara Pemda, Tentara Nasional Indonesia (TNI), relawan, media massa, dan masyarakat. Komunikasi dan informasi tentang merapi dilakukan dengan lancar baik melalui media massa radio, televisi, koran, serta internet. Meskipun semua persiapan sudah dilakukan sebaik-baiknya, namun dalam peristiwa bencana alam tidak ada yang benar-benar siap.

Letusan Gunung Merapi selalu dilalui dengan proses yang panjang yang dimulai dengan pembentukan kubah, guguran lava pijar, awan panas yang secara definisi sesungguhnya awal dari erupsi tipe efusif. Berikut contoh gambar Merapi dan dampaknya.

**Gambar 8. Gunung Merapi Meletus dan Akibat Pascabencana
Erupsi Merapi 2010**



Di bawah ini ditampilkan tabel yang memuat waktu letusan dan lamanya letusan tersebut yang dihitung sejak masa awal proses erupsi hingga letusan puncak secara menyeluruh.

**Tabel 2. Daftar masa letusan, lamanya kegiatan, dan masa istirahat
Gunung Merapi sejak tahun 1871**

Tahun Kegiatan	Lamanya Kegiatan (tahun)	Masa Istirahat/ Lama Istirahat (tahun)	Waktu Letusan Puncak
1871-1872 (*)	1	1872-1878/6	15 April 1872
1878-1879	1	1878-1881/3	Dalam tahun 1879
1882-1885	3	1885-1886/1	Januari 1883
1886-1888	3	1888-1890/2	Dalam tahun 1885
1890-1891	1	1891-1892/1	Agustus 1891
1892-1894	2	1894-1898/4	Oktober 1894
1898-1899	1	1899-1900/1	Dalam tahun 1898
1900-1907	7	1907-1908/1	Terjadi tiap tahun
1908-1913	5	1913-1914/1	Dalam tahun 1909
1914-1915	1	1915-1917/2	Maret-Mei 1915
1917-1918	1	1918-1920/2	Februari, April 1922
1920-1924 (*)	4	1924-1930/6	18 Des '30, 27

1930-1935 (*)	5	1935-1939/4	Apr'34
1939-1940	1	1940-1942/2	23 Des.'39, 24 Jan'40
1942-1943	1	1943-1948/5	Juni 1942
1948-1949	1	1949-1953/4	29 September 1948
1953-1954 (*)	1	1954-1956/2	18 Januari 1954
1956-1957	1	1957-1960/3	3 Januari 1953
1960-1962	2	1962-1967/5	8 Mei 1961
1967-1969 (*)	2	1969-1972/3	8 Januari 1969
1972-1974	2	1974-1975/1	13 Desember 1972
1975-1985	10	1985-1986/7	15 Juni 1984
1986-1987	1	1986-1987/1	10 Oktober 1986
1992-1993	1	1987-1992/5	2 Februari 1992
1993-1994	1	1993/5 bln	22 November 1994
1996-1997	1	1994-1996/2	14,17 Januari 1997
1998	1 bln	1997-1998/1	11,19 Juli 1998
2000-2001	1	1998-2000/2	10 Februari 2001
2010	2 bulan	2011-	26 Oktober 2010

(Sumber Referensi Utama Direktorat Vulkanologi Data Dasar Gunungapi Indonesia 1979, B. Voight, R.Sukhyar dan A.D. Wirakusumah *Journal of volcanology and geothermal research Volume 100*, 2000, J.A. Katili, Suparto S. *Pemantauan Gunungapi di Indonesia dan Filipina* (1995), dan Suparto S. Siswawidjojo (1997, disempurnakan).

Letusan Merapi pada tahun 2010 merupakan bencana Merapi terburuk sejak tahun 1870 atau dalam kurun waktu 100 tahun (www.republika.co.id, 2010). Menurut data Kementerian Kesehatan (Desember 2010) terdapat 185 korban tewas akibat letusan Merapi 26 Oktober dan 5 November 2010. Sedangkan jumlah pengungsi tercatat ada 279.779 orang dengan rincian di Kabupaten Magelang 88.274 orang, Kota Magelang 2.772 orang, Boyolali 39.767 orang, Klaten 93.224 orang, Sleman 52.945 orang, Kulonprogo 2.797 orang, belum termasuk korban lahar dingin pascaerupsi Merapi. Konsekwensi dari suatu bencana letusan gunungapi adalah jatuhnya korban jiwa. Sepanjang sejarah, letusan Merapi telah menimbulkan korban jiwa meninggal atau luka sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar masa letusan dan korban jiwa Gunung Merapi

Letusan 1672	meninggal 3.000 orang	luka tidak ada
Letusan 1822	meninggal 100 orang	luka tidak ada
Letusan 1832	meninggal 32 orang	luka tidak ada
Letusan 1872	meninggal 200 orang	luka tidak ada
Letusan 1904	meninggal 16 orang	luka tidak ada
Letusan 1920	meninggal 35 orang	luka tidak ada
Letusan 1930	meninggal 1.369 orang	luka tidak ada
Letusan 1954	meninggal 64 orang	luka 57 orang
Letusan 1961	meninggal 6 orang	luka tidak ada
Letusan 1969	meninggal 3 orang	luka tidak ada
Letusan 1976	meninggal 29 orang akibat lahar	luka 2 orang
Letusan 1994	meninggal 66 orang	luka 6 orang
Letusan 1997	meninggal tidak ada	luka tidak ada
Letusan 1998	meninggal tidak ada	luka tidak ada
Letusan 2001	meninggal tidak ada	luka tidak ada
Letusan 2006	meninggal 2 orang	luka tidak ada
Letusan 2010	meninggal 185	luka ribuan

(B. Voight, R.Sukhyar dan A.D. Wirakusumah *Journal of volcanology and geothermal research* Volume 100, 2000, ditambah data korban letusan 2010).

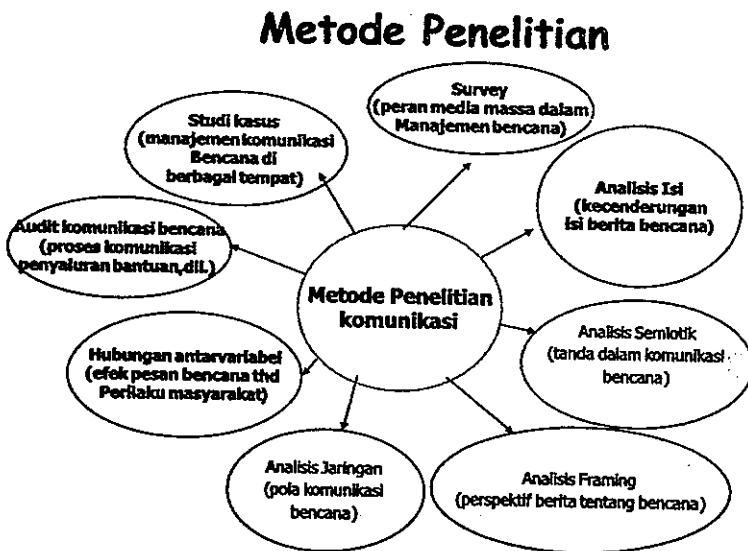
Peluang Riset Bencana

Peluang riset tentang manajemen komunikasi bencana masih sangat terbuka. Banyak hal bisa digali baik melalui pendekatan teoretis atau praktis, pendekatan subjektif atau objektif, dan menggunakan berbagai pilihan tentang metode penelitian yang sesuai dengan persoalan yang diteliti. Berikut gambaran peluang penelitian tentang manajemen komunikasi bencana (lihat gambar 8 dan 9).

Gambar 9. Peluang penelitian manajemen komunikasi bencana menggunakan beberapa teori atau konsep komunikasi.



Gambar 10. Peluang penelitian tentang manajemen komunikasi bencana dengan berbagai metode penelitian komunikasi.



Metode Pengumpulan Informasi

Informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cara :

1. Studi dokumentasi, yaitu melakukan review atas informasi yang sudah ada melalui berbagai dokumen yang ada, seperti :
 - a. File kantor
 - b. Organisasi lain.
 - c. Lembaga pemerintah
 - d. Lembaga agama
 - e. *Contact Person* yang memahami wilayah bencana dengan baik.
2. Observasi, dengan mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana.
3. Wawancara, dengan membangun percakapan-percakapan terbuka langsung dengan para korban dalam suasana informal. Biasanya situasi informal akan membantu mendapatkan informasi yang lebih dalam daripada dalam suasana formal. Diskusi dengan komunitas korban biasanya dengan melakukan wawancara semi-terstruktur, dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:
 - a. Sensitif terhadap konteks masalah dan kondisi komunitas korban. Dalam menjelaskan maksud dan tujuan percakapan jangan sampai menimbulkan harapan tertentu yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh organisasi. Dalam mengajukan pertanyaan jangan sampai menyebabkan ketersinggungan atau kemarahan korban.
 - b. Percakapan harus menjadi 'obrolan' yang terarah dengan pancingan-pancingan pertanyaan kunci. Topik kemudian akan berkembang dengan sendirinya dalam percakapan nanti tergantung dari keahlian pewawancara untuk memancing issue-issue yang diperlukan dalam assessment tersebut.
 - c. Pertanyaan yang diajukan harus terbuka, seperti bagaimana...?, mengapa...?
 - d. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberi pilihan langsung seperti *apakah Anda butuh kelambu?* Tentu saja orang akan menjawab *ya*, walaupun *kelambu* bukan yang sangat mereka butuhkan saat itu.

- e. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dengan mudah oleh komunitas korban. Bila perlu menggunakan bahasa daerah (apabila korban yang diwawancarai mayoritas berbahasa daerah).
- f. Bila memakai penterjemah, harus dipastikan bahwa penterjemah hanya menterjemahkan apa yang dibicarakan, dan tidak memberikan penafsiran-penafsiran sendiri.
- g. Sebaiknya setiap informasi dicatat atau direkam agar tidak lupa, tentu saja dengan persetujuan yang diwawancarai.
- h. Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih segera setelah selesai melakukan wawancara.
- i. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara dan atau dialog informal terutama dalam kondisi-kondisi yang sensitif (konflik, kerusuhan, dan lain-lain) adalah sebagai berikut adalah hindari bertindak seperti wartawan atau pekerja di media massa dan berperilaku memihak kepada salah satu kubu atau pihak yang bertikai.

Adapun output riset tentang manajemen komunikasi bencana antara lain dapat berupa :

1. Model Manajemen Komunikasi Bencana di Indonesia (atau daerah tertentu).
2. Model Komunikasi dalam Pelatihan Fasilitator Manajemen Bencana.
3. Model Komunikasi Penyuluhan tentang Resiko Bencana.
4. Pembuatan Buku atau bahan ajar tentang sosialisasi manajemen komunikasi bencana tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.
5. Model Pelatihan Manajemen Konflik Komunikasi untuk relawan, pemerintah, dan masyarakat.
6. Pola jaringan manajemen komunikasi bencana di Indonesia.
7. Pola komunikasi lintas budaya di daerah bencana.
8. Menemukan teori atau konsep Komunikasi Bencana.

Adapun sumber biaya penelitian dapat diperoleh antara lain : dari pemerintah (program DP2M Dikti), perguruan tinggi, perusahaan

swasta dan BUMN, serta dana hibah dari NGO dalam dan luar negeri. Dana dari DP2M Dikti dapat dilihat dari beberapa program penelitian pada www.dikti.go.id secara ringkas tentang skim dan tujuan penelitiannya, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Program Penelitian Hibah DP2M Dikti menurut skim dan tujuannya.

No.	Skim Penelitian	Tujuan
1.	Fundamental Riset	Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
2.	Hibah Bersaing	Inovasi dan Invensi Ipteks
3.	Hibah Pekerti	menggalang kerjasama peneliti;
4.	Hibah Pascasarjana	mutu penelitian di pasca, interaksi promotor dan bimbingannya.
5.	RAPID (RISET ANDALAN PERGURUAN TINGGI DAN INDUSTRI)	komersialisasi hasil penelitian dan pengabdian
6.	Hibah Kompetensi	Memberikan kepercayaan kepada para peneliti yang berkompeten dibidangnya.
7.	Unggulan Strategis	Mempercepat terwujudnya industrialisasi yang terintegrasi
8.	Penelitian Prioritas Strategis Nasional	Menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional
9.	Penelitian kerjasama International	Meningkatkan kerjasama riset internasional dalam mendorong Publikasi International
10.	Penelitian Kerjasama antar Lembaga	Memfasilitasi kegiatan penelitian antar lembaga
11.	Penelitian Disertasi Doktor	Membantu mahasiswa program doktor dalam penyelesaian disertasinya

Setiap skim penelitian sudah ada penjelasan secara rinci, termasuk ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi, waktu pengusulan, jadwal penelitian, jumlah anggaran yang dialokasikan, dan alasan

penerimaan dan penolakan, serta contoh cover, halaman pengesahan, dan sebagainya. Judul-judul yang sudah pernah didanai juga ada di web dikti tersebut. Biasanya proses pengajuan ke DP2M Dikti antara bulan Maret-April, dipanggil presentasi proposal antara bulan Desember-Februari. Pelaksanaan penelitian antara bulan Mei-Oktober. Pengajuan proposal ke DP2M Dikti harus melalui lembaga penelitian pada perguruan tinggi masing-masing.

Simpulan

Bencana demi bencana telah melanda wilayah di Indonesia, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Akibat bencana berupa kerugian jiwa dan harta benda tak terelakkan lagi. Rentetan bencana tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat, bahwa manajemen komunikasi bencana sangat diperlukan, sementara kajian yang ada masih sangat terbatas. Inti dari manajemen komunikasi bencana adalah penanggulangan masalah-masalah bencana yang didasarkan pada penguasaan kompetensi komunikasi pada setiap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atas penanggulangan yang efektif dan efisien, dilandasi dengan adanya kepemimpinan yang proaktif, mempunyai *sense of crisis*, serta menciptakan hubungan antar manusia yang baik.

Suatu mitigasi bencana penting disosialisasikan sedini mungkin melalui berbagai teknik komunikasi guna pengurangan resiko bencana. Saat terjadi bencana dan pasca bencana, manajemen komunikasi bencana sangat membantu kelancaran proses rekonstruksi dan rehabilitasi.

Peran manajemen komunikasi bencana di Indonesia sangat penting, baik tataran praktis maupun teoretis atau konseptual. Penguasaan kompetensi atau kecakapan komunikasi dalam proses penanganan bencana secara praktis diperlukan oleh pemerintah, relawan, pendonor, masyarakat korban bencana, pengelola media dan lain-lain yang terlibat dalam proses penanganan bencana. Kompetensi komunikasi meliputi kompetensi komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, publik, media massa, komunikasi lintas budaya, dan komunikasi interaktif melalui media baru.

Selain tataran praktis, dibutuhkan juga pengembangan teori-teori atau konsep-konsep komunikasi melalui riset manajemen komunikasi bencana. Dengan riset, akan diperoleh pengembangan ilmu komunikasi, khususnya tentang manajemen komunikasi bencana di Indonesia. Riset dapat dilakukan secara kuantitatif, kualitatif, maupun metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan memperhatikan metode mana yang dominan dan kurang dominan. Metode yang kurang dominan, sifatnya mendukung atau melengkapi metode yang dominan. Adapun dana riset dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu: perguruan tinggi, pemerintah daerah, DP2M Dikti, lembaga swadaya masyarakat (NGO) di dalam dan luar negeri, serta berbagai program CSR perusahaan, dan lain-lain.

Daftar Pustaka :

- Abrar, Ana Nadhya, 2010, *Relasi Manusia dan Media Baru : Perspektif Manajemen Media*, bagian dari buku *Potret Manajemen Media di Indonesia*, Penyunting Diah Hayu Rahmitasari, Total Media, Yogyakarta.
- Arif, Ahmad, 2010, *Jurnalisme Bencana Bencana Jurnalisme Kesaksian dari Tanah Bencana*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Tembi, Tifa, dan LSPP, Jakarta.
- Lestari, Puji, *Manajemen Komunikasi Bencana di Daerah Rawan Bencana (Studi pada bencana gempa bumi di Kecamatan Gantiwarno Klaten)*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN "Veteran" Yogyakarta, Volume 5, Nomor 3, September-Desember 2007*.
- Lestari, Puji, Susilastuti, dan Retno Hendariningrum, *Manajemen Konflik berbasis Budaya Lokal sebagai Upaya Meningkatkan Jati Diri Bangsa Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI), Volume I nomor 1, Oktober 2009*.
- Melissa, Ezmieralda dan Anis Hamidati, 2011, *Teknologi Media Baru dan Interaksi Sosial Antar Manusia*, bagian dari buku *Komunikasi 2.0 Teoritisasi dan Implikasi*, editir Fajar Junaedi, ASPIKOM, Buku Litera, Perhumas BPC Yogyakarta, Yogyakarta.

Spignesi, Stephen J, 2006, *100 Bencana Terbesar Sepanjang Masa*, alih bahasa Bonifasius Sindyarta, S.Psi., KARISMA Publishing Group, Batam.

Susanto, Astrid, 1988, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

West, Richard and Lynn H. Turner, 2007, *Introducing Communication Theory*, McGraw-Hill Companies. New York.

Voight B, R. Sukhyar dan A.D. Wirakusumah *Journal of Volcanology and Geothermal research Volume 100, 2000.*

Sumber lain :

Asmadi, *Manajemen Penanganan Kasus Bencana*, Makalah seminar PWI Yogyakarta bekerjasama dengan UPN "Veteran" Yogyakarta, 2 Desember 2010.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sarasehan Sinergi Media Massa dan Masyarakat : Pulihkan Daerah Bencana Letusan Gunung Merapi*, Keynote Speaker pada seminar PWI Yogyakarta bekerjasama dengan UPN "Veteran" Yogyakarta, 2 Desember 2010.

Notosrijoedono, Anggraeni, *Pemetaan Pasca Bencana Bagi Pencari Berita dari Profesi Pekerja Sosial*, Makalah seminar PWI Yogyakarta bekerjasama dengan UPN "Veteran" Yogyakarta, 2 Desember 2010.

Silvia Fanggalda, Yanne Tamonop, Yus Nakmofa, Supported by PIKUL and Oxfam, 2002, *Draft Manual Manajemen dan Sistem Penanganan Kondisi Darurat (Emergency Management Manual)*, Forum Kesiapan dan Penanganan Bencana (FKPB) Kupang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

<http://bacatanda.wordpress.com/2008/01/16/pentingnya-komunikasi-bencana-alam/>

<http://cetak.kompas.com/read/2011/03/16/0250227/ketangguhan.jepang.memukau.dunia>.

Kompas, Maret 2011.

www.dikti.go.id.

www.republika.co.id, 2010.

